

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan dalam bidang pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting terutama dalam mempersiapkan manusia yang berkualitas. Semakin baik pendidikan suatu bangsa, semakin baik pula kualitas bangsa tersebut. Karena pentingnya pembangunan pendidikan tersebut, pendidikan nasional menurut Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 Pasal 3 memiliki fungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab¹.

Pendidikan adalah usaha sadar dan bertujuan untuk mengembangkan kualitas manusia. Sebagai suatu kegiatan yang sadar akan tujuan, maka dalam pelaksanaannya berada dalam suatu proses yang berkesinambungan dalam setiap jenis dan jenjang pendidikan. Kegiatan pembelajaran di sekolah adalah inti kegiatan dalam pendidikan. Segala sesuatu yang telah diprogramkan akan dilaksanakan dalam kegiatan belajar mengajar. Semua komponen inti pembelajaran yakni guru dan anak didik melakukan kegiatan dengan tugas dan

¹ Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 Pasal 3, Bandung, Citra Umbara, 2003, 3.

tanggung jawab dalam kebersamaan berlandaskan interaksi normatif untuk bersama-sama mencapai tujuan pembelajaran².

Jika dikaitkan dengan pendidikan di sekolah, maka pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.

Pendidikan dalam perspektif demokrasi adalah sebuah komponen penting dalam institusi masyarakat. Pendidikan menjadikan warga masyarakat mampu mengembangkan pemikiran kritis, kreatif, dan progresif yang dapat menopang praktik demokrasi dalam masyarakat. Sejarah mencatat, para intelektual dari golongan berpendidikanlah yang memegang peranan penting sebagai penggagas berdirinya Republik Indonesia. Praktik pendidikan yang tidak memberi ruang bagi siswa tersebut terjadi hampir pada seluruh mata pelajaran termasuk juga pada pendidikan Islam.

Disadari atau tidak, pada kenyataannya berbagai macam persoalan yang terjadi pada pendidikan Islam baik secara praktik maupun teori selalu mengemuka. Berbagai persoalan muncul dipermukaan, dan sudah banyak para tokoh Islam mencoba membahas persoalan tersebut. Seiring dengan berjalannya waktu, ternyata sampai saat ini pendidikan Islam belum mampu untuk menjawab berbagai persoalan-persoalan yang ada, apalagi di era globalisasi dan

² Djamarah, Saiful Bahri, *Guru dan Anak Didik: dalam Interaksi Edukatif*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000, 18.

teknologi mutakhir seperti sekarang ini. Oleh karenanya, pengembangan demokrasi pendidikan dalam rangka mewujudkan peran pendidikan bagi masyarakat demokratis merupakan dimensi penting dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan di Indonesia.

Pendidikan demokratis ini dapat dipahami sebagai adanya sikap saling bertoleransi, saling menghargai, saling menghormati, dan saling mengurangi keegoisan antara guru dan siswa demi tercapainya kepentingan bersama yaitu tercapainya ilmu pengetahuan dan nilai-nilai kebaikan, serta terciptanya kehidupan komunitas akademik yang kokoh dalam spiritualitas, hidup dalam keberagaman serta kemanusiaan yang utuh.

Proses pendidikan demokratis terwujud dengan adanya kebebasan bertanggung jawab. Maksud dari kebebasan tersebut adalah kebebasan yang menghormati dan memahami kebebasan di antara guru dan siswa dengan batasan tertentu yaitu hak dan kewajiban masing-masing.

Untuk itu di sekolah diperlukan strategi dan pendekatan pendidikan demokratis dengan cara melakukan pembelajaran yang demokratis, pembelajaran demokratis (*democratic teaching*) adalah suatu bentuk upaya menjadikan sekolah sebagai pusat kehidupan demokrasi melalui proses pembelajaran yang demokratis.³ Secara singkat pembelajaran demokratis adalah proses pembelajaran yang dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi, yaitu penghargaan terhadap kemampuan, menjunjung keadilan, menerapkan persamaan kesempatan, dan memperhatikan keragaman peserta didik. Dalam praktiknya

³ Budimansyah, Dasim, *Pembelajaran Pendidikan Kesadaran Berdemokrasi*, Bandung Genesindo, 2004, 5-7.

para pendidik hendaknya memposisikan peserta didik sebagai insan yang harus dihargai kemampuannya dan diberi kesempatan untuk mengembangkan potensinya.

Untuk itu diperlukan suasana terbuka, akrab, dan saling menghargai, dan sebaliknya perlu dihindari suasana belajar kaku, penuh dengan ketegangan, dan sarat dengan perintah dan instruksi yang membuat peserta didik menjadi pasif, tidak bergairah, cepat bosan dan mengalami kelelahan.

Pembelajaran akan mampu mengembangkan sikap demokratis apabila guru dalam proses pembelajaran bersikap demokratis, suasana tidak tegang, menyenangkan, memberikan kesempatan kepada siswa, memberikan reward, tidak ada keberpihakan atau menyudutkan kelompok tertentu, sehingga guru berperan sebagai fasilitator, mediator, motivator dan evaluator.⁴

Artinya sikap demokratis yang ditampilkan guru di kelas dalam proses pembelajaran sangat berpengaruh terhadap pengembangan sikap demokratis seseorang, untuk itu dalam proses pembelajaran harus dihindari suasana belajar kaku, penuh dengan ketegangan, dan sarat dengan perintah dan instruksi yang membuat peserta didik menjadi pasif dan tidak berkembangnya sikap demokratis pada diri siswa.

Praktik pendidikan yang tidak memberi ruang bagi siswa tersebut terjadi hampir pada seluruh mata pelajaran termasuk juga pada pendidikan Agama Islam. Disadari atau tidak, pada kenyataannya berbagai macam persoalan yang terjadi pada pendidikan Agama Islam baik secara praktik maupun teori selalu

⁴ Fahdita, *Pembelajaran Sejarah Melalui Cooperatif Learning Dalam Peningkatan Sikap Demokratis Siswa*, UPI Bandung, 2004, 142.

mengemuka. Berbagai persoalan muncul dipermukaan, dan sudah banyak para tokoh Islam mencoba membahas persoalan tersebut. Seiring dengan berjalannya waktu, ternyata sampai saat ini pendidikan Agama Islam belum mampu untuk menjawab berbagai persoalan-persoalan yang ada, apalagi di era globalisasi dan teknologi mutakhir seperti sekarang ini.

Selama ini praktik pendidikan Agama Islam tidak memberi ruang bagi siswa untuk berbeda pendapat dengan gurunya, kalau berbeda dengan mudah diberi label dosa dan ancaman neraka. Penindasan kehendak adalah pengalaman paling jelas dan otentik sejak anak-anak manusia itu memasuki bangku sekolah. Akibatnya, menjadikan anak didik muram karena tertimpa beban pelajaran yang berlebihan, mereka takut dan gelisah menghadapi guru.

Secara empiris, pendidikan dilakukan melalui kegiatan belajar mengajar. Namun pada tataran implementasinya, hampir tidak disadari jika *tren* pendidikan dan pembelajaran yang berkembang pada dekade terakhir ini adalah belajar untuk belajar. Bukan lagi belajar untuk dapat bertahan hidup dalam kondisi yang jauh semakin komplek ke depan. Bahkan, sekolah sebagai ujung tombak pendidikan secara sengaja ataupun tidak, selama ini telah menanamkan sikap yang berlebihan pada diri siswa bahwa pentingnya belajar adalah untuk menghadapi ujian. Ujian merupakan target dan derajat tertinggi yang harus dikuasai dan ditempuh dengan segala cara. Baik cara yang positif semisal dengan memberikan tambahan pelajaran secara intensif maupun cara yang negatif, seperti dengan memberikan bocoran soal, kunci jawaban, dan lain sebagainya. Fenomena ini terbukti dengan terungkapnya beberapa kasus

kecurangan di beberapa lembaga pendidikan.

Fakta juga menunjukkan bahwa pendidikan dan pembelajaran yang berlangsung di sekolah-sekolah selama ini kurang memberikan peluang bagi peserta didik untuk berimajinasi dan berkreasi. Praktik pendidikan dan pembelajaran yang berlangsung masih saja memperlakukan peserta didik tidak lebih sebagai pelayan dan pendidik sebagai tuannya. Kondisi ini diperparah dengan proses pembelajaran yang masih menekankan pada hafalan, tanpa pengertian yang memadai. Sementara budaya bertanya dan berfikir kritis menjadi hal yang tabu untuk dilakukan, maka, yang terjadi adalah siswa tidak terdidik, tetapi dilatih, ditatar, dan dibekuk agar menjadi penurut.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kegiatan pembelajaran yang berlangsung nyaris tidak pernah berupaya serius dalam menumbuhkan nilai-nilai demokrasi kepada peserta didik. Bahkan, yang terjadi adalah sebuah proses pembusukan nilai-nilai demokrasi. Terkikisnya nilai-nilai demokrasi dan humanisme dalam karakter pendidikan saat ini, juga ditunjukkan dalam proses pembelajaran di kelas yang masih menempatkan guru sebagai penindas yang memposisikan dirinya sebagai subjek pendidikan, dengan menganggap dirinya paling berkuasa dan paling mengetahui tentang pengetahuan.

Sekolah sebagai bagian sistem pendidikan, seharusnya dapat menjadi tempat persaudaraan siswa, sehingga dapat hidup bersama tanpa adanya rasa takut satu sama lainnya dan belajar bersama berdasarkan pertukaran dan gagasan ide yang kreatif.

Pendidikan Agama Islam akan menjadi sarana efektif untuk membantu

peserta didik dalam upaya mengangkat, mengembangkan dan mengarahkan potensi pasif yang dimilikinya menjadi aktif yang dapat teraktualisasi dalam kehidupannya secara maksimal.⁵ Dalam konteks ini pendidikan Agama Islam harus dibedakan dengan pendidikan Islam, Pendidikan Islam dengan Pendidikan Agama Islam adalah dua istilah yang terkadang disamapahamkan, padahal keduanya itu berbeda.

Pendidikan Islam adalah pendidikan yang berwarna Islam, atau pendidikan yang Islami. Sedangkan Pendidikan Agama Islam, yang dimaknai sebagai pendidikan yang mengajarkan tentang apa itu agama Islam⁶.

Peningkatan kualitas yang maksimal tersebut akan lebih strategis jika dikembangkan sebagai dasar bagi pemberdayaan otonomi manusia dalam pendidikan Agama Islam. Karena pendidikan yang berlangsung selama ini masih bersifat indoktrinatif dan tidak memberi kebebasan bagi manusia untuk berkembang.

Apabila umat Islam dalam hal ini selalu melindungi dan mempertahankan keadaan seperti ini berarti mengizinkan dan menginginkan berhentinya dinamika ilmu pengetahuan dan akhirnya pendidikan Agama Islam tidak mampu berkembang mengimbangi dinamika sosial, ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat.

Berangkat dari persoalan-persoalan tersebut, nampak jelas bahwa pendidikan Agama Islam yang diperlukan umat saat ini adalah pendidikan

⁵ Nizar, Samsul, *Filsafat Pendidikan Islam , Pendekatan Historis, Teoritis dan Praktis*, Jakarta, Ciputat Press, 2002, 201.

⁶ Tafsir, Ahmad, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 1994, 98.

Agama Islam demokratis, yaitu pendidikan yang mengutamakan kebebasan manusia untuk mengembangkan segala kreatifitasnya, berdasarkan nilai-nilai Islam dan selalu menyediakan ruang perubahan secara dinamis dan positif sesuai dengan tuntutan zaman.⁷ Dengan demikian pendidikan Agama Islam yang demokratis akan selalu membuka ruang dialog, kritik, aspirasi dan inisiatif demi terwujudnya masyarakat demokratis.

Fenomena yang berkaitan dengan masalah pendidikan Agama Islam demokratis di SMA Negeri 1 Kadugede kabupaten Kuningan menunjukkan bahwa pendidikan masih perlu diadakan perubahan dalam melaksanakan pendidikan Agama Islam, baik peserta didik ataupun dalam pembelajarannya yang belum menunjukkan pendidikan bernuansa demokratis. Hal ini bisa dilihat dari proses pembelajaran yang berlangsung. Selama ini, masih banyak guru yang selalu menganggap bahwa dirinya adalah orang yang paling pintar, kurang memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk berkreaitivitas, kurangnya keterbukaan mengenai kelemahan guru, dan menganggap paling berhak dalam memperlakukan peserta didik sesuai dengan kemauannya, suasana belajar yang kaku, penuh dengan ketegangan, sarat dengan perintah dan instruksi yang membuat peserta didik menjadi pasif dan tidak bergairah, cepat bosan dan mengalami kelelahan.

Berdasarkan fenomena tersebut, dalam mengimplementasikan pendidikan Agama Islam demokratik ini tidak tumbuh dengan sendirinya, akan tetapi dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya peserta didik, guru, model

⁷ Kuntowijoyo, *Paradigma Islam , Interpretasi Untuk Aksi*, Bandung, Mizan, 1991, 164-165.

pembelajaran, dan kepala sekolah. Kepala sekolah sedikitnya mempunyai peran dan fungsi sebagai edukator, manajer, administrator, supervisor, leader, inovator dan motivator dalam organisasi sekolah. Oleh karena itu sebuah organisasi harus memiliki gaya kehidupan yang demokrasi.

Hal inilah permasalahan utama yang melatarbelakangi pembahasan masalah dalam tesis ini. Dengan prinsip dasar bahwa Islam adalah agama yang universal (rahmatan lil'alam) yang keberadaannya diarahkan untuk kesejahteraan manusia yang sesungguhnya secara substansial mengandung nilai-nilai demokrasi yang bisa dijadikan sebagai paradigma dasar untuk membangun sebuah pendidikan ideal bagi pembangunan sumber daya manusia seutuhnya.

SMA Negeri 1 Kadugede kabupaten Kuningan sebagai lembaga pendidikan formal harus mencoba untuk mengadakan reorientasi dan rekonstruksi lembaga pendidikannya menuju integralisasi antara nilai-nilai religius dan demokratis yaitu dengan mengupayakan internalisasi nilai-nilai demokrasi khususnya pada implementasi Pendidikan Agama Islam (PAI). Dari sini diharapkan bisa mencetak generasi muslim yang demokratis, bersih, bermoral dan berakhlak serta berpegang teguh pada nilai keadaban.

Tugas guru sebagai pendidik tidak hanya terbatas pada penyampaian materi kepada siswa, tetapi mempunyai tanggungjawab dalam mengarahkan, membina siswa khususnya dan mampu memberikan suasana damai dan harmonis pada setiap warga sekolah. Oleh karena itu, guru pendidikan Agama Islam dituntut tanggap terhadap berbagai perkembangan dan kondisi yang terdapat di lingkungan lembaga pendidikan tersebut serta memahami

keberagaman anggota warga sekolah, inilah yang membuat penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang implementasi pendidikan Agama Islam demokratis di SMA Negeri I Kadugede Kuningan.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut :

- a. Demokrasi sangat mengedepankan prinsip keadilan, persamaan, kebebasan dan musyawarah dalam memecahkan permasalahan sehingga prinsip ini tidak bertentangan dengan Islam.
- b. Selama ini praktik pendidikan Agama Islam tidak memberi ruang bagi siswa untuk berbeda pendapat dengan gurunya, sehingga materi ajar pendidikan Agama Islam bersifat tunggal karena kebebasan peserta didik untuk berpendapat dibatasi yang akhirnya menjadikan pendidikan Agama Islam sebagai proses indoktrinasi tunggal tentang kebenaran yang tidak mungkin dibantah.
- c. Sekolah sebagai lembaga pendidikan, belum bisa sepenuhnya mengerti dan memahami keinginan peserta didik untuk bisa mengembangkan potensi yang dimiliki secara maksimal.

2. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat mencapai tujuan yang jelas, maka penulis perlu menjelaskan batasan pembahasannya. Penulisan tesis ini, akan mengungkapkan tentang implementasi pendidikan Agama Islam demokratis.

Pendidikan Agama Islam demokratik ini dimaksudkan untuk merujuk pada sumber Islam yang autentik, serta merujuk pada teori-teori para ahli tentang hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan Agama Islam demokratik.

Para pemikir pendidikan kontemporer, yang *concern* dengan pendidikan Agama Islam demokratik dimaksudkan akan menjadi rujukan utama (*term of reference*) dalam penulisan tesis ini. Sebagai bahasan utama, pendidikan Agama Islam demokratik akan dikaji secara serius dan mendalam, sehingga dapat dideskripsikan secara sistematis dan menghasilkan konsep yang diinginkan secara utuh tentang implementasi pendidikan Agama Islam demokratik.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep pendidikan Agama Islam demokratik ?
2. Bagaimana pelaksanaan pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 1 Kadugede kabupaten Kuningan ?
3. Bagaimana implementasi pendidikan Agama Islam demokratik di SMA Negeri 1 Kadugede kabupaten Kuningan ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan ruang lingkup permasalahan sebagaimana dirumuskan di atas, penelitian ini dimaksudkan :

- a. Untuk mendeskripsikan konsep pendidikan Agama Islam demokratik.
- b. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 1 Kadugede kabupaten Kuningan.
- c. Untuk mendeskripsikan implementasi pendidikan Agama Islam demokratik di SMA Negeri 1 Kadugede kabupaten Kuningan.

2. Kegunaan Penelitian

Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat berguna baik secara praktis akademik, filosofis, sosial akademik, maupun secara konseptual.

- a. Secara praktis akademik, berguna bagi khazanah kepustakaan.
- b. Secara filosofis akademik, berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan.
- c. Secara sosial akademik, berguna bagi kepentingan masyarakat pendidikan.
- d. Secara konseptual, berguna bagi penemuan konsep baru sesuai disiplin ilmu.

E. Kajian Terdahulu

1. Jurnal Al-Hikmah Vol. XIV Nomor 2 (2013): Ahmad Imran Syuaib, *Pembelajaran yang demokratis di madrasah*. Beberapa kesimpulan dari jurnal tersebut adalah sebagai berikut :

Dalam rangka menanamkan sikap demokrasi di lingkungan pendidikan adalah seorang guru harus bersikap terbuka tanpa ada diskriminasi pada individu-individu (siswa) dan tidak hanya memandang siswa sebagai objek

tetapi ia harus menganggap sebagai teman diskusi. Dengan demikian diharapkan para siswa nanti secara kreatif mampu mengkonstruksi nilai moral dan teori iptek yang fungsional bagi masalah hidupnya sendiri.⁸

2. Jurnal : Miftahur Rozaq, Pendidikan Islam Berbasis Pluralis dan Demokratis, kesimpulan dari jurnal tersebut adalah: Pendidikan Islam berbasis pluralis dan demokratis, dalam arti bahwa Pendidikan Islam harus memiliki karakter. Pendidikan Islam yang diberikan kepada siswa tidak menciptakan pemahaman yang tunggal, tetapi pemahaman tentang realitas keragaman dan kemajemukan. Pendidikan Islam harus memiliki karakter sebagai lembaga yang demokrasi, yang berarti bahwa sistem pendidikan Islam memberikan keleluasaan pada siswa untuk mengekspresikan pendapat mereka dalam cara yang bertanggung jawab dan menghormati hak orang lain. Pendidikan Islam harus mempunyai karakter sebagai lembaga pendidikan yang menghidupkan sistem demokrasi dalam pendidikan. Sistem pendidikan yang memberikan keleluasaan pada siswa untuk mengekspresikan pendapatnya secara bertanggung jawab. Sekolah memfasilitasi adanya “mimbar bebas”, dengan memberikan kesempatan kepada semua civitas untuk berbicara atau mengkritik tentang apa saja, asal bertanggung jawab. Tentunya,

⁸ Ahmad Imran Syuaib, 2013, *Pembelajaran yang demokratis di madrasah*, Jurnal Al-Hikmah Vol. XIV Nomor 2, 10.

sistem demokrasi ini akan memberikan pendidikan pada siswa tentang realitas sosial yang mempunyai pandangan dan pendapat yang berbeda.⁹

3. Jurnal Ilmiah Islam Futura: Murdani, Implementasi pembelajaran demokratis, sebuah studi tentang pembelajaran SKI pada Madrasah Tsanawiyah di Aceh. Kesimpulan dari jurnal ini adalah: pembelajaran demokratis adalah suatu strategi pembelajaran yang mengoptimalkan peranan siswa ketika proses pembelajaran berlangsung dan adanya hubungan timbal balik yang seimbang antara guru dan siswa di kelas. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan definisi, pelaksanaan, dan efek negatif apa saja bagi siswa tanpa penggunaan pembelajaran demokratis dan implikasinya terhadap guru dan siswa dalam pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di MTs dalam Provinsi Aceh. Hasil penelitian ini menemukan fakta pada tataran aplikatifnya yakni secara umum para tenaga kependidikan dalam mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di MTs dalam Provinsi Aceh, telah melaksanakan strategi pembelajaran demokratis di kelas melalui metode diskusi, tanya jawab, dan kerja kelompok, meskipun sebagiannya ada yang tidak melaksanakan karena berbagai faktor yakni ketidaktahuan dan tidak profesionalnya dalam menjalankan tugas. Berbagai hal yang mendasar perlu dilakukan pembenahan untuk mengatasi masalah tersebut di atas dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas dari elemen pembelajaran itu sendiri

⁹ Miftahur Rozaq, *Pendidikan Islam Berbasis Pluralis dan Demokratis*, Jurnal Vol. 2 Januari, 2010, 3.

yakni tenaga pendidik, fasilitas belajar, sistem evaluasi belajar, kurikulum, dan adanya hubungan erat dengan lingkungan sekitar sekolah baik orang tua siswa, masyarakat, pemerintah daerah, dan pihak-pihak dalam sekolah.¹⁰

4. Jurnal: Isna H. Effendi, Mewujudkan Pendidikan Islam yang Humanis (Penerapan Konsep Demokrasi Pendidikan Islam). Kesimpulan dari jurnal tersebut adalah: pendidikan Islam yang humanis akan terwujud jika diterapkannya sikap menjunjung tinggi dan mengoptimalkan berbagai fitrah manusia dalam rangka mewujudkan insan kamil dan bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Eksistensi manusia pun akan tercipta sebagai makhluk yang humanis. Pendidikan Islam yang humanis harus menjadi orientasi dan aplikasi dalam praktik pendidikan. Semua kegiatan pendidikan harus memiliki implikasi dengan tugas kehidupan manusia di dunia yaitu sebagai khalifah di muka bumi. Demokratisasi pendidikan Islam merupakan suatu wujud upaya sistem pendidikan yang mampu menciptakan suasana humanis dalam pendidikan. Dalam gagasan demokrasi dalam pendidikan Islam ada muatan-muatan sistem pendidikan, dimana pendidik dan peserta didik dapat mengembangkan potensinya dan kreatifitasnya tanpa ada pengekangan atau intimidasi dari pihak manapun. Pendidik yang memahami kedudukan dan kewajibannya sebagai pendidik serta memahami kedudukan peserta didik sehingga

¹⁰ Murdani, *Implementasi pembelajaran demokratis, sebuah studi tentang pembelajaran SKI pada Madrasah Tsanawiyah di Aceh*, Jurnal Ilmiah Islam Futura, Vol. 14. No. 2, Februari 2015, 250-260.

mengetahui apa saja yang dibutuhkan siswa harus diperhatikan untuk menerapkan demokrasi pendidikan. Demokrasi dapat diterapkan melalui metode-metode pembelajaran yang menyenangkan sehingga mampu membangkitkan dan mengembangkan segenap kompetensi siswa. Konsep yang memandang manusia seutuhnya jika dikaitkan dengan proses pendidikan berarti berusaha mengoptimalkan segenap kefitrahan (potensi kognitif, afektif dan psikomotorik) manusia untuk mewujudkan kesejahteraan eksistensi kehidupan manusia di dunia yang dilandasi dengan nilai-nilai ajaran Islam.¹¹

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini tidak ada kesamaan dengan keempat penelitian terdahulu di atas, baik dari segi tempat yang diteliti, sumber permasalahan maupun sumber data primer. Sumber data primer yang diteliti adalah implementasi pendidikan agama Islam demokratis di SMAN 1 Kadugede kabupaten Kuningan. Dalam penyajian data untuk pembahasan menggunakan teknik keabsahan data.

Keistimewaan dari penelitian ini dibandingkan dengan penelitian yang lain yang sudah ada adalah ingin mengidentifikasi dari sisi konsep implementasi Pendidikan agama Islam demokratis, kurikulum yang diterapkan, dan model-model pembelajarannya yang digunakan. Selanjutnya akan ada kesimpulan yang berbeda serta rekomendasi yang berbeda dengan penelitian yang terdahulu.

¹¹ Effendi, Isna, *Mewujudkan Pendidikan Islam yang Humanis (Penerapan Konsep Demokrasi Pendidikan Islam)*, <http://gudangilmu.blogspot.co.id.2009:10> Oktober 2009.

F. Kerangka Pemikiran

Syariat Islam tidak akan dihayati dan diamalkan orang apabila hanya diajarkan saja, tetapi harus dididik melalui proses pendidikan. Nabi Muhammad SAW telah mengajak orang untuk beriman dan beramal serta berakhlak sesuai dengan ajaran Islam dengan berbagai metode dan pendekatan. Dari satu segi kita melihat, bahwa pendidikan Islam itu lebih banyak ditujukan kepada perbaikan sikap mental yang akan terwujud dalam amal perbuatan, baik bagi keperluan sendiri maupun orang lain. Dari segi lainnya pendidikan Islam tidak bersifat teoritis saja, tetapi juga praktis, oleh karena itu pendidikan Agama Islam adalah sekaligus pendidikan iman dan pendidikan amal.¹²

Pendidikan sebagai usaha membina dan mengembangkan pribadi manusia dari aspek-aspek ruhaniah dan jasmaniah juga harus berlangsung secara bertahap. Model pendidikan Islam diantaranya adalah model pendidikan Agama Islam esensialistik. Model ini berorientasi pada nilai-nilai lama yang konservatif dan yang membentuk sosok pribadi muslim yang tahan pada pukulan zaman.

Pendidikan dalam konsep Islam sebenarnya telah menetapkan dasar dan tujuan untuk membangun manusia sebagai insan kamil, yaitu manusia paripurna, integral, totalitas, dalam membangun hidup dan kehidupannya. Pendidikan Agama Islam meletakkan kedudukan manusia sebagai subyek didik dalam upaya pembinaan dan pengembangannya. Proses pendidikan berusaha untuk melatih sensibilitas manusia sedemikian rupa, sehingga dalam perilaku mereka terhadap kehidupan, langkah-langkah dan keputusan, begitu pula pendekatan

¹² Daradjat, dkk, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta, Bumi Aksara, 1992, 28.

mereka terhadap semua ilmu pengetahuan diatur dan didasarkan pada nilai-nilai etika Islam ¹³

Pendidikan menurut bentuknya dibedakan dalam tiga kategori. *Pertama*, Pendidikan sebagai suatu proses belajar mengajar, *kedua*, pendidikan sebagai suatu kajian ilmiah, dan *ketiga*, pendidikan sebagai lembaga pendidikan. Pendidikan disebut suatu proses belajar mengajar karena pendidikan selalu melibatkan seorang guru yang berperan sebagai tenaga pengajar dan murid sebagai peserta didiknya. ¹⁴

Pendidikan sebagai usaha membina dan mengembangkan pribadi manusia dari aspek-aspek ruhaniah dan jasmani juga harus berlangsung secara bertahap, oleh karena suatu kematangan yang bertitik akhir pada optimalisasi perkembangan dan pertumbuhan dapat tercapai bilamana berlangsung melalui proses demi proses ke arah tujuan akhir perkembangan atau pertumbuhannya.

Pendidikan Agama Islam berarti sistem pendidikan yang dapat memberikan kemampuan seseorang untuk memimpin kehidupannya sesuai dengan cita-cita dan nilai-nilai Islam yang telah menjiwai dan mewarnai corak kepribadiannya. ¹⁵

¹³ Sanaky AH, Hujair, *Paradigma Pendidikan Islam Membangun Masyarakat Madani Indonesia*, Yogyakarta, Sifiria Insania Pers, 2003, 231.

¹⁴ Muliawan, Jasa Ungguh, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2015, 13.

¹⁵ M Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta, PT Bumi Aksara, 2008, 65.

Pendidikan Islam adalah bimbingan jasmani rohani berdasarkan hukum-hukum agama menuju kepada terbentuknya kepribadian utama berdasarkan ukuran-ukuran Islam.¹⁶

Pendidikan agama Islam ialah pendidikan yang bertujuan membentuk individu menjadi makhluk yang bercorak diri berderajat tinggi menurut ukuran Allah dan sisi pendidikan untuk mewujudkan tujuan atau adalah ajaran Allah.¹⁷

Pendidikan Islam adalah usaha sistematis dan praktis dalam membentuk anak didik agar supaya mereka hidup sesuai ajaran agama Islam.¹⁸

Sarana yang dapat dilakukan dalam mentransformasikan nilai-nilai agama tersebut antara lain melalui sekolah, Madrasah Diniyah atau majelis ta'lim yang berfungsi memberikan pemahaman tentang nilai-nilai ajaran Islam.

Firman Allah SWT surat Ali-imron ayat 104 yang berbunyi :

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ١٠٤

Artinya :

*“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.” (Q.S Ali Imron Ayat : 104).*¹⁹

Dari ayat di atas dijelaskan bahwa ada tanggung jawab yang harus dilakukan oleh seorang muslim kepada muslim lainnya yakni mengajak kepada yang ma’ruf (segala perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah SWT, dan

¹⁶ Marimba, Ahmad D, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*, Bandung, PT AL-MA’arif, 1989, 19.

¹⁷ Hamdani Ihsan, *Filsafat Pendidikan Islam*, Bandung, CV Pustaka Setia 1998, 15.

¹⁸ Zuhairini, *Metodik Khusus Pendidikan Agama*, Surabaya, PT Usaha Nasional, 1983, 27.

¹⁹ Depag, *Al-Qur’an*, 93.

mencegah kepada yang munkar (segala perbuatan yang menjauhkan diri kepada Allah SWT). Dari pengertian pendidikan Islam di atas, terlihat dengan jelas sesuatu yang diharapkan terwujud setelah orang mengalami pendidikan Islam secara keseluruhan, yakni kepribadian seseorang yang membuatnya menjadi insan kamil atau manusia yang sempurna yang artinya manusia utuh rohani dan jasmani, dapat hidup dan berkembang wajar dan normal karena taqwanya terhadap Allah SWT.

Impian pendidikan berkualitas hanya dapat diwujudkan dalam alam demokrasi pendidikan dan demokrasi pendidikan hanya dapat diwujudkan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis. Namun, kenyataannya kehidupan yang demokratis masih lebih merupakan keinginan daripada kenyataan.²⁰

Dalam rangka merealisasikan dan mengembangkan sistem pendidikan yang demokratis di Indonesia, perlu memperhatikan tujuh butir yang merupakan prinsip-prinsip dalam prosedur-prosedur yang demokratis antara lain: (1) mengutamakan kepentingan masyarakat, (2) tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, (3) mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, (4) musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi semangat kekeluargaan, (5) memiliki i'tikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah, (6) musyawarah yang dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur, (7) keputusan yang diambil harus dapat dipertanggung-jawabkan secara moral

²⁰ Mastuhu, *Menata Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan Nasional dalam Abad 21*, Yogyakarta, Safiria Insania Press, 2003, 84.

kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan.²¹

Kebijakan pendidikan seharusnya bersifat akomodatif terhadap aspirasi rakyatnya sebagai konsekuensi Indonesia yang menganut sistem politik demokrasi. Dengan diberlakukan otonomi daerah yang termasuk di dalamnya otonomi bidang pendidikan, maka kebijakan pendidikan yang demokratis telah mendapat wadah pengejawantahannya secara jelas. Upaya mewujudkan integrasi bangsa perlu adanya kebijakan pendidikan diorientasikan pada peningkatan mutu SDM dan pemerataannya di daerah.

Upaya untuk memperkuat integrasi bangsa disamping melalui kebijakan pendidikan yang demokratis juga dapat melalui pendidikan demokrasi. Pendidikan demokrasi akan dapat meningkatkan integrasi bangsa karena merupakan proses transformasi nilai-nilai dari sistem politik nasional yang telah disepakati yakni sistem politik demokrasi.

Kalau tujuan akhir pendidikan adalah perubahan perilaku dan sikap serta kualitas seseorang, maka pengajaran harus berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak sekedar memberi informasi atau pengetahuan melainkan harus menyentuh hati, sehingga akan mendorongnya dapat mengambil keputusan untuk berubah. Disamping bertujuan untuk memperteguh keyakinan pada agamanya, pendidikan agama Islam juga harus diorientasikan untuk menanamkan empati, simpati dan solidaritas terhadap sesama.

Demokrasi secara kebahasaan ialah kekuasaan yang dijalankan oleh

²¹ Arbi, Sutan Zanti, *Pengantar kepada Filsafat Pendidikan*, Jakarta, Dikti Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988, 294.

rakyat, dilaksanakan oleh rakyat, dan untuk kepentingan rakyat. Demokrasi secara lebih luas ialah segala hal yang memiliki asas kemerdekaan, asas persamaan, dan asas persaudaraan pada lingkungan yang dijalankannya.²²

Secara istilah (terminologis) dapat dikatakan bahwa demokratisasi dalam lingkup pendidikan dan pembelajaran, berarti pemberian peluang yang sama kepada setiap siswa untuk memasuki lembaga pendidikan/ persekolahan yang ada. Kalau secara umum dapat dikatakan bahwa kebijakan ini sebagai pemberian peluang yang sama kepada rakyat untuk mengikuti upaya pendidikan yang ada, ini berarti pemberian pemerataan kesempatan pendidikan kepada semua. Pemberian kesempatan ini mencakup tiga makna, yakni: persamaan kesempatan (*equality of opportunity*), aksesibilitas, keadilan atau kewajaran (*equality*).²³

Konsep pendidikan maupun pembelajaran demokratik adalah membebaskan siswanya untuk mengekspresikan semua potensi yang dimilikinya. Sebenarnya juga pembebasan tersebut secara tidak langsung akan memberdayakan siswa itu sendiri melalui mekanisme pendidikan. Karena siswa pada usia sekolah menengah dan khususnya menengah atas semua kemampuan dan bakat yang dimilikinya harus mutlak dikenali oleh guru kemudian diarahkan untuk kesuksesan siswa tersebut di masa mendatang.

Berdasarkan pengertian pendidikan demokrasi yang telah ditulis dan rumuskan di atas, peneliti mencoba membandingkan dengan beberapa konsep

²² Tafsir, Ahmad, *Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam*, cetakan ke 4, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2004, 131.

²³ Hamalik, Oemar, *Proses Belajar-Mengajar*, Jakarta, Bumi Aksara, cetakan ke 6, 2007, 27-28.

definisi pembelajaran maupun strategi belajar-mengajar demokratis dari beberapa ahli pendidikan.

Proses pembelajaran harus demokratis, yakni semua siswa dalam semua kategori memperoleh layanan yang wajar dari guru, guru sebaiknya bertanya kepada siswanya tentang pokok bahasan yang mereka ingin pelajari, berikut bentuk-bentuk penugasannya, lalu dibahas bersama sehingga sampai pada kesepakatan dengan tidak mengabaikan tujuan pembelajaran, dan target-target kurikuler yang harus dicapai. Salah satu pendekatan dalam pembelajaran untuk mendukung konsep ini ialah pendekatan *collaborative learning* yang semata dikembangkan untuk menumbuhkan rasa memiliki siswa terhadap program pembelajarannya itu, serta memberikan penghargaan yang wajar pada siswa, sehingga gairah mereka untuk belajar bisa terus dikembangkan.²⁴

Wacana pembelajaran demokratis haruslah diterapkan secara nyata dalam konteks pembelajaran di dalam kelas.²⁵ Secara jelasnya metode pembelajaran demokratis terlaksana melalui interaksi yang *humanistic*, yaitu: menumbuhkan manusia yang berkepribadian dalam diri setiap siswa, sehingga dapat mengikis mentalitas masyarakat yang suka latah dan bertaklid buta.

Untuk itu siswa hendaknya diajak banyak bertanya serta merefleksikan apa yang dipelajarinya untuk mempertimbangkan dan merenungkan pelajaran dan berbagai hal yang terjadi di sekitarnya. Termasuk di dalamnya sekolah harus mengembangkan rasa keadilan siswa. Guru harus membuka mata siswa

²⁴ M. Sirozi, *Politik Pendidikan*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2005, 155.

²⁵ Abdullah, Ambo Enre, *Pendidikan di Era Otonomi Daerah: Gagasan dan Pengalaman*, Yogyakarta, Pustaka Timur, 2005, 208.

terhadap ketidakadilan yang banyak terjadi di sekeliling kita, karena dengan demikian, perasaan keadilan akan tumbuh pada diri mereka. Para siswa juga perlu dibantu untuk mengembangkan sikap keagamaan yang dewasa, terbuka dan toleran. Juga menjadi manusia yang pemberani, kreatif, mandiri dan tidak asal menurut apa yang diucapkan oleh guru, teman dan orang-orang di lingkungannya, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, yang serba tidak puas dengan jawaban sementara. Lebih lanjut, para siswa yang berkepribadian diharapkan mampu menjadi manusia pembangun masyarakat modern, yaitu manusia yang tahu dan menerima baik keunggulan maupun kelemahannya, tidak dihindari kerendahan hati palsu, karena bangga dan sadar atas kepribadiannya yang berharga dan penting bagi sesama. Ia menggunakan kemampuannya secara penuh dan pantang mundur kendati memiliki kekurangan. Ia menerima dirinya sendiri maupun orang lain apa adanya. Ia tidak berkelit menghadapi kenyataan, sebaliknya, berani *to face the facts*, beradu dada dengan kenyataan.²⁶

Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa sifat dari pendidikan Agama Islam demokratik antara lain: *Fleksibel, open minded*, menolak berbagai bentuk otoritarian dan absolutisme, liberal (bahwa manusia sejak awal memiliki kebebasan & kemampuan untuk eksis dalam setiap perubahan), maka tugas utama pendidikan Agama Islam demokratik ini adalah mengoptimalkan keberlangsungan dan kontinuitas perkembangan potensi awal (fitrah) manusia tersebut. Proses pendidikan Agama Islam dapat disebut

²⁶ Rosyada, Dede, *Paradigma Pendidikan Demokratis : Sebuah Model Pelibatan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pendidikan*, Jakarta, Kencana, cetakan ke 3, 2007, 280.

demokratik apabila memenuhi beberapa karakter dasar sebagai berikut: (a) bertolak dari, oleh dan untuk peserta didik, ditopang oleh prinsip dasar bahwa setiap menentukan sesuatu harus atas dasar musyawarah mufakat secara bebas, wajar, terbuka dan bertanggung jawab, (b) Menekankan pengakuan kesederajatan padagogis dan menempatkan peserta didik sebagai individu yang unik, hidup dan memiliki bakat, minat, kecerdasan, skill dan sikap yang berbeda satu sama lainnya, karenanya ia mesti menggunakan *treatment* yang berbeda pula sesuai dengan karakter mereka masing masing. (c) Melibatkan peserta didik secara aktif dalam semua proses pendidikan serta mengacu pada *continous progress* dalam meningkatkan percepatan *achievement* dan pemberian kebebasan bagi akselerasi kreatifitas para peserta didik. (d) Mencerminkan bahwa belajar adalah prakarsa peserta didik, pengakuan akan hak-hak peserta didik untuk memperoleh sesuatu sesuai dengan yang dibutuhkannya, dan (e) Berupaya membebaskan peserta didik dari berbagai bentuk penindasan, dehumanisasi, budaya verbal, mekanik dan dangkal, serta membebaskan peserta didik dari berbagai problem kebodohan, kemiskinan dan keterbelakangan.

G. Sistematika Penelitian

Penelitian ini mencakup lima bab yang disusun secara sistematis, seputar kontekstualisasi konsep pendidikan agama Islam demokratik sebagai upaya untuk mencari format pendidikan agama Islam yang demokratis, yang kemudian terumuskan melalui tema penelitian dengan judul implementasi pendidikan agama Islam demokratik (studi kasus di

SMA Negeri 1 Kadugede kabupaten Kuningan). Secara keseluruhan penelitian ini mencakup lima bab, masing-masing disusun secara sistematis dalam sub bahasan sebagai berikut:

Bab I, merupakan pendahuluan, yang di dalamnya mencakup latar belakang masalah yang membenarkan pentingnya penelitian mengenai implementasi pendidikan agama Islam demokratik di SMAN 1 Kadugede kabupaten Kuningan. Dari latar belakang masalah itu kemudian dipertegas dan juga terperinci dalam perumusan masalah penelitian, dan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan, keinginan yang ingin dicapai pada implementasi pendidikan agama Islam demokratik di SMAN 1 Kadugede kabupaten Kuningan dituangkan dalam tujuan dan manfaat penelitian, kajian terdahulu, kemudian kerangka pemikiran, langkah-langkah penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II, kajian pustaka, membahas tentang kajian teori dalam penelitian, yaitu sekilas tentang demokrasi dan pendidikan Islam, demokratisasi pendidikan Islam, dan konsepsi ideal tentang model pendidikan agama Islam masa depan, yakni pendidikan agama Islam yang demokratis sehingga mampu menjawab problematika keumatan dan kebangsaan.

Bab III, membahas tentang metodologi penelitian di SMAN 1 Kadugede, uraian di dalamnya berisi tentang objek penelitian, metode penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahapan penelitian.

Bab IV, membahas tentang gambaran objek penelitian yang mencakup sejarah perkembangan berdirinya dan data-data sekolah lainnya di SMAN 1 Kadugede kabupaten Kuningan, konsep pendidikan Islam dan implementasi pendidikan agama Islam demokratik dalam Perspektif metode, pembelajaran dan juga dalam kelembagaan, dan penjelasan hasil penelitian di SMAN 1 Kadugede kabupaten Kuningan mengenai implementasi pendidikan agama Islam demokratik dari sisi metode, implementasi pendidikan agama Islam demokratik dari sisi pembelajaran, dan implementasi pendidikan agama Islam demokratik dari sisi kelembagaan. Kemudian mencakup faktor-faktor dan pendorong dan faktor penghambat pelaksanaan implementasi pendidikan agama Islam demokratik di SMAN 1 Kadugede kabupaten Kuningan, cara menanggulangi faktor penghambat implementasi pendidikan agama Islam demokratik di SMAN 1 Kadugede kabupaten Kuningan, upaya dalam peningkatan kualitas pendidikan agama Islam demokratik di SMAN 1 Kadugede kabupaten Kuningan.

Bab V, Kesimpulan dan saran, bab ini merupakan bab penutup yang pembahasannya meliputi kesimpulan dan saran-saran tentang implementasi pendidikan agama Islam demokratik di SMAN 1 Kadugede kabupaten Kuningan.

